

**Evaluasi Pelaksanaan Asas *Good Cooperative Governance* melalui
Pengendalian Internal terhadap Aktivitas Simpan Pinjam pada Koperasi
(KPRI X) di Sidoarjo**

Sheilla Erdini Arfaprimasari

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

sheillaerdini26@yahoo.com

Senny Harindahyani

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

senny.h@staff.ubaya.ac.id

Abstrak – Penerapan *good governance* tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan swasta atau BUMN, namun juga dibutuhkan pada semua organisasi seperti koperasi. *Good Cooperative Governance* (GCG) dapat membantu dalam mencapai sasaran organisasi dan menentukan teknik pemantauan kinerja. Pelaksanaan kelima asas GCG dipengaruhi oleh peran pengendalian internal, maka diperlukan penerapan pengendalian internal yang tepat agar koperasi dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan asas GCG untuk mendapatkan gambaran dan pengetahuan mengenai efektivitas pengendalian internal aktivitas simpan pinjam yang telah diterapkan. Hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) X di Sidoarjo menunjukkan bahwa penerapan pengendalian untuk mendukung tercapainya GCG telah dilaksanakan dengan cukup efektif karena sebagian besar KPRI X telah melaksanakan asas GCG dan pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan tujuan.

Kata Kunci : Koperasi, Efektivitas, *Pengendalian Internal*, *Good Cooperative Governance*

Abstract - Implementation of good governance is not only required by private companies or BUMNs, but also required in all organizations such as cooperatives. Good Cooperative Governance (GCG) can assist in achieving organizational goals and determining performance monitoring techniques. The implementation of the five GCG principles is influenced by the role of internal controls, it is necessary to apply appropriate internal controls to enable the cooperative to operate effectively. This study aims to evaluate the application of

internal controls in support of the implementation of GCG principles to obtain a picture and knowledge about the effectiveness of internal controls of savings and loan activities that have been applied. The results of research conducted on Cooperative Employees of the Republic of Indonesia (KPRI) X in Sidoarjo showed that the application of control to support the achievement of GCG has been implemented quite effectively because most of KPRI X has implemented GCG principles and internal control has been run in accordance with the objectives.

Keywords : *Cooperative, Effectiveness, Internal Control, Good Cooperative Governance*

PENDAHULUAN

Kata koperasi mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, terutama bagi mereka yang telah tergabung menjadi anggota. Iskandar (2015) menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha bukan bank yang membentuk suatu kelompok untuk menyediakan jasa yang bersifat simpan pinjam saat awal pembentukan dengan mengadakan kegiatan pengumpulan modal berbentuk simpanan.

Perkembangan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Laporan Kementerian Koperasi dan UKM pada periode 2009 sampai 2014 terjadi kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 39.077 unit koperasi dan diikuti peningkatan pertumbuhan anggota Koperasi sebanyak 7.203.682 orang. Adanya peningkatan pertumbuhan koperasi belum tentu bisa menarik minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi dikarenakan koperasi di Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan usaha lain, sehingga koperasi dituntut melakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dengan membuat program pemberdayaan koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola manajemen (Meliadi dan Sukri, 2017).

Dalam konsep *Good Corporate Governance*, penyebutan kata *corporate* seolah-olah konsep ini hanya berlaku terbatas untuk lingkup perusahaan saja (Priyambodo, 2012). Namun, konsep tersebut ditentang oleh Andayani (2001) yang menyatakan bahwa *good governance* maupun tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebenarnya merupakan konsep dan instrumen

umum sebagai langkah pembaharuan dalam sistem organisasi yang bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara *shareholders* dan *stakeholders* lainnya.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi diharapkan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan Bangsa Indonesia. Akan tetapi undang-undang tersebut belum mengatur tentang penerapan konsep *Good Corporate Governance* pada koperasi. Oleh karena itu, Kementrian Koperasi dan UKM perlu menerapkan *Good Cooperative Governance* (Iskandar, 2015).

Darmawati *et al.* (2004) menjelaskan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran – sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja. Dalam penerapan *Good Governance*, pengelolaan koperasi harus tetap memperhatikan asas - asasnya yaitu transparansi, kemandirian dan profesionalisme, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan (Wibowo dan Subagyo, 2017). Tata kelola koperasi yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya koperasi yang mendukung *Good Governance*, sistem kerja manajemen, peraturan dan kebijakan, dan sistem pengendalian internal (Priscilla, 2008). Maka dari itu, sejalan dengan penerapan *Good Governance* berdasarkan asas-asasnya diperlukan dukungan pengendalian internal yang tepat dan peran pengurus yang berkompeten dan cermat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pengendalian internal dalam koperasi perlu diterapkan dan dirancang dengan tepat pada semua aktivitas. Permasalahan yang timbul menjadi tanggung jawab dan dibawah kendali manajemen. Banyaknya permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada suatu organisasi yang dapat menjadi peluang untuk melakukan sebuah kecurangan. Aktivitas simpan pinjam merupakan salah satu aktivitas yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatannya. Berbagai macam fenomena dapat terjadi salah satunya yaitu kesalahan dalam melakukan pencatatan (*human error*) sehingga menimbulkan permasalahan antara anggota dengan pengurus koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih banyak koperasi yang belum tepat dalam menerapkan *Good Cooperative Governance* yang dapat mengarah kedalam koperasi yang tidak sehat, sehingga merugikan pada pihak lain dan terutama koperasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan *Good Cooperative Governance* berdasarkan kelima asasnya melalui *internal control* untuk mencapai efektivitas pada aktivitas simpan pinjam di KPRI X. Melihat jumlah simpanan dan pinjaman anggota dalam sebulan yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, adanya risiko salah saji sering terjadi dalam koperasi ini yang dikarenakan KPRI X belum memanfaatkan perkembangan teknologi dalam perhitungan. Pada studi kasus ini, koperasi memiliki jam operasional bekerja secara *flexible* dan aktivitas simpan pinjam dikerjakan oleh pengurus yang merangkap sebagai karyawan sehingga pengawas kesulitan dalam memantau kinerja pengurus karena pengerjaan dapat dilakukan diluar kantor KPRI X.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *explanatory research* dengan paradigma *positivism* sebagai cara pandang atau kerangka berpikir pada penelitian ini. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengungkapkan penyebab dan memberikan evaluasi yang telah dilakukan para pengurus dan anggota koperasi terkait ketidaktepatan penerapan kinerja yang tidak berjalan secara efektif dengan melihat kembali kebenaran dari teori yang terdapat dalam bab dua serta, memberikan saran untuk perbaikan aktivitas operasional yang belum tepat.

Seluruh informasi dan data yang diperoleh peneliti diperoleh langsung dari sumber data primer milik KPRI X pada tahun 2016 dan 2017 dan sumber data sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur karena dengan metode tersebut jawaban yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam. Penulis menyusun daftar pertanyaan inti dan model *check list* terkait penerapan

pengendalian internal. Wawancara dilakukan kepada Ketua, Pengawas, dan Bendahara KPRI X.

2. Observasi

Observasi dilakukan menggunakan metode *non-participant* dengan mengamati secara langsung namun, tidak ikut berkontribusi dalam kegiatan operasional KPRI X.

3. Analisis dokumen.

Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang relevan terkait aktivitas simpan pinjam seperti visi misi dan tujuan, struktur organisasi, peraturan koperasi, *Job Description*, catatan dana simpan pinjam nasabah, dan formulir pengajuan permohonan pinjaman. Data tersebut diperoleh melalui Pengawas dan Ketua Pengurus KPRI X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas-asas GCG dipengaruhi oleh beberapa elemen penting salah satunya yaitu pengendalian internal. Peran pengendalian internal yang baik sangat mendukung dalam pengimplementasian GCG karena dengan adanya pengendalian internal yang baik menunjukkan bahwa koperasi telah bekerja secara efektif, sehingga koperasi dapat terus meningkatkan kinerjanya dan tujuan koperasi dapat tercapai. Sebagian besar KPRI X telah menerapkan pengendalian internal yang sesuai dengan ketentuan dalam asas GCG, namun juga terdapat beberapa pengendalian yang belum diterapkan dalam koperasi ini karena alasan tertentu sehingga pelaksanaan tata kelola koperasi belum bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan asas GCG. Dalam menunjang tercapainya tujuan pengendalian internal dibutuhkan beberapa komponen pengendalian yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga kinerja para pengurus dapat meningkat dan

menumbuhkan kedisiplinan anggota dalam mengelola koperasi. Penerapan pengendalian internal pada komponen ini telah diterapkan cukup baik oleh KPRI X sesuai dengan ketentuan asas GCG.

a. Transparansi

Adanya sosialisasi terkait visi misi, *job description*, struktur organisasi, dan prosedur aktivitas simpan pinjam saat Rapat Anggota Tahunan.

b. Akuntabilitas

KPRI X telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis. Pergantian jabatan pengurus dilakukan setiap tiga tahun sekali. Adanya jam operasional keseharian secara fleksibel membuat pengawas kesulitan dalam memantau kinerja pengurus karena tugas perkoperasian dapat dikerjakan diluar kantor KPRI X serta waktu yang tidak menentu.

c. Profesionalisme

Anggota yang akan menjadi calon pengurus harus memiliki sertifikat pelatihan perkoperasian karena menjadi pengurus/pengawas harus memiliki kemampuan dalam menganalisis persetujuan pengajuan pinjaman oleh anggota agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari.

d. Tanggung jawab

Pengawas memiliki tanggung jawab penuh dalam pengawasan baik aktif maupun pasif terhadap kinerja pengurus terkait kebenaran laporan keuangan yang diajukan oleh pengurus.

e. Keadilan

Sisa Hasil Usaha dibagikan secara adil berdasarkan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus akan mendapatkan tambahan SHU sebesar 5% dari total bersih SHU karena telah berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan usaha simpan pinjam.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

KPRI X telah melakukan proses penilaian risiko dengan mempertimbangkan apabila melakukan perubahan dalam suatu hal, maka juga harus mempertimbangkan segala risiko yang dapat berpengaruh dalam

perkembangan dan kemajuan koperasi. Selain itu, dalam menghadapi perubahan tetap memperhatikan asas-asas dalam GCG.

a. Transparansi

Dalam menghadapi kondisi mendesak ketua tetap berupaya mengajak para bawahan untuk bermusyawarah secara terbuka, kemudian keputusan hasil rapat ditulis dalam berita acara (notula rapat) untuk diinformasikan kepada anggota lain.

b. Akuntabilitas

Dalam restrukturisasi, pengurus yang menjabat diperiode sebelumnya tidak semua diganti dengan calon pengurus baru. Kepengurusan periode baru terdiri dari 60% pengurus lama dan 40% pengurus baru. Calon pengurus baru harus memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman dalam kepengurusan.

c. Profesionalisme

Melaksanakan diklat perkoperasian bagi pengawas, pengurus dan anggota yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengurus, pengawas dalam berkoperasi. Metode penghitungan masih menggunakan media kalkulator dan belum memanfaatkan *software*. Kurangnya penyesuaian terhadap perubahan teknologi dapat berpotensi adanya risiko kesalahan saat penginputan maupun penghitungan pada laporan keuangan karena melihat total anggaran KPRI X cukup besar dalam sebulan.

d. Tanggung jawab

KPRI X tidak menerapkan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat luar, namun menyediakan dana sosial bagi anggota yang tertimpa musibah karena KPRI X mengutamakan kesejahteraan para anggotanya.

e. Keadilan

Menyetarakan pemberian hak dan kewajiban kepada setiap pemangku kepentingan KPRI X dengan cara mengenakan tarif simpanan yang adil antara anggota lama dan baru.

3. *Aktivitas Pengendalian (Control Activity)*

Bentuk penerapan aktivitas pengendalian pada KPRI X dapat dilihat dari bagaimana cara pengawas dan pengurus dalam mengambil tindakan namun tetap berpedoman pada asas GCG untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat menghambat koperasi untuk mencapai tujuan.

a. *Transparansi*

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam RAT dan melakukan sosialisasi hasil pencapaian RAPB dalam setahun.

b. *Akuntabilitas*

KPRI X tidak melakukan rangkap jabatan dalam kepengurusan namun, pemisahan fungsi antar pengurus belum tepat karena pada setiap *job description* pengurus II tertulis membantu tugas pengurus I sesuai kebutuhan sehingga menjadi tidak efektif karena adanya saling membantu

c. *Profesionalisme*

Sistem otorisasi belum berjalan dengan baik karena pengurus tidak membuat bukti persetujuan pemberian pinjaman kepada anggota sehingga, tidak ada konfirmasi dalam bentuk fisik mengenai kesepakatan besar pinjaman dan angsuran.

d. *Tanggung jawab*

Pengamanan inventaris dan buku-buku KPRI X menjadi tanggung jawab sekretaris II dan pleno. Lemari pengarsipan dokumen dilengkapi dengan kunci dan terdapat penjaga pada gedung KPRI X.

4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*

Penerapan informasi dan komunikasi mendukung pelaksanaan asas profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam GCG.

Penerapan komponen informasi dan komunikasi hendaknya didukung dengan koordinasi dari semua anggota agar proses bertukar informasi dapat berjalan dengan baik.

a. **Transparansi**

Dalam RAT seluruh informasi kondisi keuangan seperti pencapaian target simpan dan pinjam, kekayaan KPRI X, dan pelaporan SHU disampaikan secara detail. Bersikap transparan sangat diperlukan dalam RAT karena anggota sebagai pemilik modal memiliki hak untuk mengetahui kondisi dan pengelolaan koperasi.

b. **Akuntabilitas**

Peraturan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) disusun berdasarkan pedoman undang-undang perkoperasian yang lama yaitu UU No. 25 Tahun 1992. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pengendalian agar RAT dapat berjalan dengan lancar tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

c. **Profesionalisme**

RAT diselenggarakan secara rutin pada setiap tahun.

d. **Keadilan**

Adanya RAT dapat membantu anggota untuk mengarahkan pengurus dalam mengelola jalannya aktivitas simpan pinjam. Pengarahan jalannya aktivitas simpan pinjam dari anggota menunjukkan bahwa dalam RAT memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan usulan dan pendapat bagi kepentingan koperasi.

5. **Pengawasan (*Monitoring*)**

Pemantauan dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang telah diterapkan dalam koperasi terutama aktivitas simpan pinjam dapat berjalan dengan efektif dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan yang dapat merugikan bagi KPRI X maupun anggota. Sebagai

pengganti tim audit internal, pemantauan dilakukan oleh pengawas dan ketua sebagai bentuk pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan asas-asas dalam GCG.

a. **Transparansi**

Pengawas KPRI X belum membuat laporan mengenai hasil evaluasi pengawasan GCG dan tidak melaporkan hasil pengawasan tersebut dalam RAT.

b. **Akuntabilitas**

KPRI X belum memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi tegas kepada pengurus dan anggota.

c. **Profesionalisme**

Salah satu syarat untuk menjadi pengawas dan pengurus pada KPRI X adalah harus memiliki sertifikat pelatihan perkoperasian dan disetiap restrukturisasi pengurus tidak semua diganti dengan pengawas dan pengurus baru.

d. **Tanggung jawab**

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan oleh ketua, setiap tiga bulan oleh pengawas. Selain itu setiap tahun, pengawas juga melakukan pencocokan aset fisik dengan catatan pengurus. Namun, pengawas belum pernah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara mendadak kepada pengurus.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas peran pengendalian internal terhadap pelaksanaan *Good Cooperative Governance* (GCG) menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan untuk mencapai GCG terhadap aktivitas simpan pinjam di KPRI X cukup efektif karena sebagian besar pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan memenuhi tiga kriteria

pengendalian yaitu preventif, detektif, dan korektif sehingga menunjukkan bahwa realisasi GCG mendekati keberhasilan. Namun, KPRI X juga memiliki beberapa kelemahan untuk segera dilakukan perbaikan.

2. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Bagi KPRI X

- a. Sebaiknya atas persetujuan ketua, pengawas menetapkan hari dan waktu setiap 2 minggu sekali bagi pengurus untuk mengerjakan tugas-tugasnya dalam satu tempat, sehingga dapat mempermudah pengawas dalam mengontrol kinerja pengurus.
- b. Sebaiknya pengurus terutama bendahara mulai memanfaatkan *software* seperti Ms. Excel sehingga penginputan menjadi lebih cepat dan penghitungan lebih akurat, selain itu hasil rekapitulasi data menjadi lebih tertata.
- c. Sebaiknya, KPRI X mengadakan rapat bersama pengurus untuk memperbaiki penulisan “membantu tugas pengurus I sesuai kebutuhan” dalam *job description* dengan menambahkan pembagian masing-masing tugas pengurus yang belum tertulis secara adil.
- d. KPRI X memperbaiki sistem otorisasi dengan membuat dokumen persetujuan pemberian pinjaman kepada anggota sebagai bukti fisik atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai jumlah dan angsuran pinjaman.
- e. Pengawas KPRI X menyusun laporan evaluasi GCG dalam satu tahun agar tata kelola yang belum efektif dapat selalu diperbaiki dan para anggota dapat mengetahui kondisi tata kelola dalam KPRI X.
- f. Sebaiknya KPRI X memberikan penghargaan yang layak kepada pengurus/anggota karena telah bekerja dengan baik dan aktif dalam kegiatan perkoperasian. Selain itu juga menjalankan sanksi tegas

kepada anggota/pengurus yang melanggar peraturan tanpa adanya rasa toleransi meskipun koperasi berazaskan kekeluargaan.

- g. Sebaiknya pengawas juga melakukan pemeriksaan mendadak kepada pengurus karena dengan adanya pengawasan secara rutin pengurus telah mengetahui jadwal pemeriksaan dan apabila ada kemungkinan pengurus melakukan kecurangan maka aksinya akan dipersiapkan sebelum pemeriksaan sehingga pengawas kesulitan untuk mendeteksi.

B. Bagi Penelitian Selanjutnya

Melakukan penelitian dengan membandingkan penerapan *Good Cooperative Governance* melalui pengendalian internal pada koperasi yang memiliki jam operasional tetap dan fleksibel sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. *Good Corporate Governance* sebagai Syarat Perusahaan Publik untuk Mendapatkan Dana. *Lintasan Ekonomi Volume XVIII*, Nomor 2, Juli 2001. Hal 4.
- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Anonim. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Anonim. 2008. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Hal 16.
- Anonim. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Anonim. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- Anonim. 2015. Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia: Membangun Koperasi dan UMKM sebagai Ketahanan Ekonomi Nasional. Hal 14.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara.
- Arfamaini, Revi dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2014. Prosiding Peran Pengawas Dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur. FEB Unair, Hal 61-62.
- Arikanto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astiti, Sujana, dan Purnamawati. 2017. Analisis Kebutuhan Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Koperasi Se-Kota Singaraja). Hal 7-8.
- Boynton, William C., Raymond N. Johnson, dan Walter G. Kell. 2015. *Modern Auditing Edisi Ketujuh Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Darmawati, D. dan R. G. R. Khomsiyah. 2004. “ Hubungan *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. “ *The Indonesian Institute for Corporate Governanve IICG. Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Deliarnov. 2007. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan MTs kelas VIII*. Jakarta: Esis.
- DEPKOP. 2017. Koperasi Dituntut Segera Lakukan Perubahan. <http://www.depkop.go.id/content/read/koperasi-dituntut-segera-lakukan-perubahan/> (diunduh tanggal 7 Oktober 2017).
- DEPKOP. 2013. 3 Penyebab Koperasi di Indonesia Sulit Berkembang. http://www2.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:3-penyebab-koperasi-di-indonesia-sulit-berkembang&catid=50:bind-berita&Itemid=97 (diunduh tanggal 10 Agustus 2017).
- Fuad, Mohamad. 2015. Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam pada Koperasi “Kopitama” Depok. Hal 2-3.
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hall, James A. dan Tommie Singleton. 2007. *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Heri. 2011. *Auditing I: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iskandar, Bintang Kusnardani. 2015. *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal*. Hal 1-5.
- KOPKUN. 2013. Pengertian Koperasi. <http://kopkun.com/tag/definisi-koperasi> (diunduh tanggal 25 Agustus 2017)
- Moeller, Robert R. 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Integrated ERM Framework*. USA: Wiley.
- Prijambodo. 2012. *Tata Kelola yang Baik pada Koperasi (Good Governance Cooperative) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi*. Hal 1-2.
- Priscilla, Maria Bernadette. 2008. *Peranan Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Persediaan terhadap Good Corporate Governance pada PT. Hero Supermarket Tbk*. Hal 2-3.
- Prishardoyo, Bambang dan Agus Trimarwanto. 2005. *Pelajaran Ekonomi Kelas 3 SMP*. Jakarta: Grasindo.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rama, Dasaratha V. dan Frederick L. Jones. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 18 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2006). *Akuntansi Koperasi*. Jakarta : Grafindo.
- Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer, and James H. Scheiner. 2005. *Audit Internal Sawyer*, Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamban. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sucahyowati, Hari. 2017. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Malang: Wilis
- Sumarsono, Sonny. 2004. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2000. *COSO - Based Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Wibowo, Martino dan Ahmad Subagyo. 2017. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM, Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zimmerer, Thomas W., Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson. 2009. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Edisi 5 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.